

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Agusti (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa *profitabilitas* yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. *Leverage* yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dalam hal ini besar atau kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan. Dan *corporate governance* yang diukur dengan proporsi *komisaris independen* (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2012 dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian Cahyono, dkk (2016) pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 – 2013 yang pengukurannya menggunakan ROA,DER menyatakan bahwa *profitabilitas* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan jumlah *komite audit* menyatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Rosalia dan Sapari (2017) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode tahun 2012 – 2015 menyatakan bahwa *komite audit* dan *komisaris independen* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam hal ini karena BUMN memiliki proporsi *komisaris independen* rata – rata sebesar 42.2938% diatas yang di tetapkan Bapepam sebesar 30%. Sedangkan ROA dalam

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena berdasarkan data sampel menunjukkan ROA mengalami penurunan berturut – turut pada 2 perusahaan BUMN.

Hasil penelitian Sari (2014) menyatakan hasil pengujian *komisaris independen* yang diukur dengan membandingkan antara jumlah *komisaris independen* dengan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *komite audit* yang diukur menggunakan dummy tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012.

Hasil penelitian Vidiyanna dan Bella (2017) menyatakan bahwa *leverage* dan *profitabilitas* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka memberikan pengaruh berkurangnya pada laba sebelum pajak dan beban pajak semakin rendah. Namun dalam perhitungan ROA bisa memberikan dampak pada tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Hasil penelitian Jasmine (2017), studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 menggunakan metode regresi linier berganda dengan hasil *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin besarnya utang dilakukan perusahaan dengan sengaja untuk mengurangi beban pajak perusahaan sehingga nilai *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan akan semakin rendah. Untuk *profitabilitas* memiliki hasil berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak hal tersebut menunjukkan semakin tinggi

ROA perusahaan akan memiliki kesempatan untuk memposisikan dirinya dalam *tax planning* yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Dengan hasil penelitian diatas yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh *profitabilitas, leverage, corporate governance* yang menggunakan proksi *dewan komisaris independen* dan *komite audit* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun pengamatan 2016. Dalam hal ini peneliti ingin memperbaiki kekurangan penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan amanah kepada *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam tugasnya sebagai pengambil keputusan dan yang dimaksud pihak *principal* disini adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan pihak *agent* dalam penelitian ini merupakan manajer yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan amanah yang diberikan pihak *principal*.

Ulum & Sofyani (2016:87) memandang pada teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang saling bertindak untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Konflik kepentingan akan semakin meningkat ketika pemilik perusahaan tidak dapat memonitor tindakan manajer sehari-hari guna memastikan bahwa tindakan manajer telah sesuai dengan harapan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dimana pihak pemegang saham

memiliki keterbatasan mengenai informasi kinerja manajer, sedangkan manajer selaku pihak *agent* dinilai lebih mengetahui keadaan perusahaan dan prospek kedepannya dibandingkan pihak *principal*. Keadaan tersebut seringkali mendukung pihak manajemen untuk tidak memberikan informasi sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupi kelemahan kinerja manajemen atau memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak terkait yang diwujudkan dengan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan. Diharapkan dengan adanya GCG pada perusahaan pengelolaan perusahaan dapat diawasi dan dikendalikan agar pengelolaan perusahaan dapat patuh sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu bagi pemegang saham dengan adanya GCG pada perusahaan dapat memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan telah dikelola dengan baik dan memberikan *return* yang memadai.

Bila dalam penelitian ini teori keagenan dapat dihubungkan dengan tindakan manajer saat melakukan penghindaran pajak perusahaan. Guna memenuhi kewajibannya dalam mencapai keinginan pemegang saham, manajer menggunakan cara melalui pengurangan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah Undang-undang perpajakan. Sebenarnya pihak pemegang saham/pemilik perusahaan cenderung memperbolehkan adanya tindakan penghindaran pajak tetapi dengan batasan normal dan tetap memperhatikan pencapaian kepentingan dari pemegang saham/pemilik perusahaan tersebut. Namun dengan adanya asimetri informasi menjadikan pihak manajer seringkali melakukan penghindaran pajak

melebihi batas yang diperbolehkan pemegang saham/pemilik perusahaan dengan maksud untuk menutupi kekurangan kinerjanya atau untuk memaksimalkan kepentingan dirinya. Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, pihak perusahaan dapat menerapkan mekanisme GCG. Salah satu komponen mekanisme GCG yang dapat digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perusahaan adalah *dewan komisaris independen* dan *komite audit*. Proporsi *dewan komisaris independen* diharapkan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris sedangkan *komite audit* diharapkan dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan manajer dan audit independen agar teruji kelayakannya.

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak sendiri memiliki pengertian sebuah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008:43). Tujuan dari Suatu perencanaan yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang berasal dari tindakan penghematan/penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh fiskus bukan berasal dari penyelundupan pajak yang tidak diperbolehkan oleh fiskus.

Dalam *tax planning* terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk menekan kewajiban pajak wajib pajak (Pohan, 2013), yakni :

1. Tax Avoidance

Strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan perundang-undangan.

2. Tax Evasion

Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. Tax Saving

Suatu cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang dikenai pajak pertambahan nilai, atau mengurangi jam kerja sehingga pendapatan yang diperoleh akan lebih kecil dan terhindar dari kewajiban pajak yang besar.

Hingga saat ini tidak ada garis pembeda secara tegas mengenai rincian dan indikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) sehingga para perencana pajak harus lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak untuk tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan penyelundupan pajak.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Untuk meminimumkan kewajiban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) atau istilah yang sering digunakan

adalah *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy, 2001:8). Pengertian dari kedua istilah tersebut yakni *Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai pengurang atau meminimalisasi kewajiban pajak seseorang dengan cara hati-hati dan sedemikian rupa untuk memanfaatkan celah dalam ketentuan Undang-undang pajak dimana tindakan tersebut akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan ke otoritas pajak dan tindakan ini termasuk legal (Jacob, 2014).

Tax evasion adalah usaha individu maupun perusahaan untuk menghindari pajak secara illegal. Penghindaran pajak dalam bentuk *tax evasion* akan dengan sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya wajib pajak kepada otoritas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, hal tersebut termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur. Sehingga *tax evasion* selain meyalahi moral juga merupakan melanggar peraturan perpajakan, (Jacob, 2014).

Bila dilihat dari kedua pengertian istilah diatas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau menyalahi moral yang berlaku, sebab dalam rangka mengurangi beban pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan, pada dasarnya tarif PPh badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 25% (Pasal 17 ayat 1 huruf b). Artinya perusahaan harus membayar pajak penghasilan minimal 25%. Meski penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi sebab dapat merugikan Negara. Selain itu ketika suatu perusahaan ketahuan telah melakukan penghindaran pajak juga akan merugikan perusahaan itu sendiri seperti menurunnya nilai perusahaan, dll.

Menurut Dyreng *et al.* (2010) terdapat dua cara untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan, yaitu melalui *generally accepted accounting principles effective tax rate* (GAAP ETR) dan CASH ETR. GAAP ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak serta GAAP ETR memberikan gambaran mengenai beban pajak kini dan pajak tangguhan. Sedangkan CASH ETR merupakan pembayaran beban pajak secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi tax avoidance

Fenomena *tax avoidance* dilakukan oleh Perusahaan dikarenakan untuk meminimalkan beban pajak. *Tax avoidance* bisa diketahui melalui faktor – faktor yang pernah diteliti oleh Agusti (2014), Cahyono,dkk (2016), Rosalia dan Sapari (2017), Sari (2014), Vidiyanna dan Bella (2017, Jasmine (2017) sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nilai perusahaan | 6. Kompensasi fiskal |
| 2. Ukuran perusahaan | 7. <i>Corporate social responsibility</i> |
| 3. <i>Leverage</i> | 8. Manajemen laba |
| 4. <i>Profitabilitas</i> | 9. <i>Sales growth</i> |
| 5. <i>Likuiditas</i> | 10. <i>Good Corporate governance</i> |

Dalam penelitian ini peneliti memilih *profitabilitas*, *leverage*, *corporate governance* yang di proksikan melalui *dewan komisaris independen* dan *komite audit* sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

5. Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan

modal saham tertentu selain itu dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajer dalam mengelola aset. *Profitabilitas* dalam perusahaan dapat diukur menggunakan rasio GPM (*gross profit margin*), rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan berdasarkan tingkat penjualan. Menurut dosenakuntansi.com laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk. Artinya semakin besar GMP perusahaan semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan. GMP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{penjualan}}$$

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan pada tahun pajak. Maka ketika perusahaan memperoleh pendapatan atau memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya diwajibkan untuk membayar pajak pada pemerintah. Jadi semakin besar penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan (Richardson & Lanin, 2007) dalam (Amelia, 2015).

6. Leverage

Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan, (Mayangsari, 2015). Pada perusahaan *leverage* dikenal dengan tiga jenis yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan total *leverage*, penggunaan ketiga *leverage* ini digunakan dengan

tujuan agar memperoleh keuntungan pada perusahaan (Mayangsari, 2015). Perolehan keuntungan diharapkan lebih besar dari beban tetap dan sumber dana yang dikeluarkan perusahaan, sehingga keuntungan pemegang saham dapat di optimalkan. Sebaliknya *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, sebab ketika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan lebih rendah dari beban tetap dan sumber dana yang dikeluarkan maka dapat mengurangi keuntungan pemegang saham. Sehingga keputusan perusahaan dalam memilih jenis sumber pendanaan berupa utang harus dipertimbangkan dengan seksama.

Salah satu faktor perusahaan melakukan pendanaan berupa utang adalah posisi pajak perusahaan, (Weston & Brigham, 2005:150) sebab biaya bunga yang ditimbulkan dari utang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (*deductible*) sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Kemudian berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18, beban bunga yang dapat dikurangkan terhadap pendapatan kena pajak adalah beban bunga yang berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur dimana tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Untuk mengukur *Leverage* pada perusahaan dapat diukur menggunakan debt equity ratio yakni menghitung rasio total utang terhadap total ekuitas. DER menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya dengan menggunakan modal perusahaan (Saputra & Asyik, 2017). Rasio total utang terhadap total ekuitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas}}$$

Semakin besar rasio ini maka menunjukkan semakin besarnya hutang daripada modal yang dimiliki selain itu semakin tinggi pula risiko keuangan perusahaan tersebut.

7. Good Corporate Governance

Pentingnya GCG (*Good Corporate Governance*) dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat kendali untuk mengatur tatanan, fungsi, hubungan dan kepentingan berbagai pihak dalam suatu bisnis. GCG juga harus memisahkan tugas dan tanggungjawab antara pihak pengawas, pembuat peraturan, dan yang memberikan otoritas penegak hukum. KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan.

Good Corporate Governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (Fadhillah, 2014). Sedangkan menurut Hendra (2012) *Corporate Governance* merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya.

Penerapan *corporate governance* dapat dikatakan berhasil karena adanya dukungan dari unsur internal dan unsur eksternal, seperti yang dikemukakan oleh (Sutedi, 2012:41-42), bahwa unsur-unsur tersebut dinyatakan sebagai berikut:

a. Internal Perusahaan

1. Pemegang saham
2. Manajer
3. Dewan Direksi
4. Dewan Komisaris
5. Karyawan
6. Sistem remunerasi
7. Komite audit perusahaan

b. Eksternal Perusahaan:

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor Institusi penyedia informasi
3. Akuntan publik
4. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
5. Pemberian pinjaman
6. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Manfaat perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* dalam (Permana,2015) menyebutkan bahwa terdapat empat manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.

- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

a. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Terdapat lima prinsip GCG berdasarkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Kelima prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparance*)

Transparansi merupakan pengungkapan informasi yang material laporan yang diungkapkan harus bersifat relevan dan mudah dipahami dengan cara yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, suatu perusahaan harus dikelola secara independen agar keputusan atau strategi yang diambil tidak terpengaruh atau didominasi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam penerapan *corporate governance* hasil yang diinginkan adalah bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dinilai secara wajar tanpa adanya tindak kecurangan dalam penulisan laporan tersebut, prinsip ini menekankan pada pelaporan keuangan harus didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Semua prinsip tersebut harus ada dalam suatu perusahaan karena prinsip-prinsip dari *corporate governance* akan mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama keputusan mengenai perpajakan perusahaan.

b. Mekanisme Good Corporate Governance

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, *komisaris independen* berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Menurut Peraturan Nomor Ix.I.5:

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan public
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan *public*, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan *public*, dan
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan public.

Dengan adanya dewan komisaris independen yang sebagai penyeimbang pengambilan keputusan pihak manajemen, maka pihak manajemen tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Salah satunya melakukan penghindaran pajak tersebut yang bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Perekrutan dewan komisaris harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota *komisaris independen* yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di perusahaan.

2. Dewan Komite Audit

Berdasarkan Kep-315/BEJ/062000 Perihal : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate*

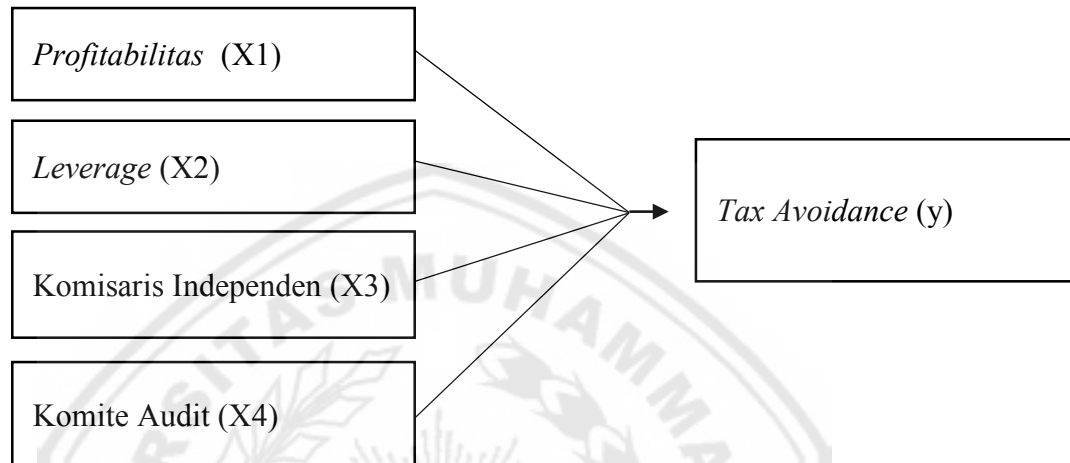
governance) setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris perusahaan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang telah disempurnakan oleh Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah dewan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris.

Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Utami, 2013). Dengan berjalannya fungsi komite secara efektif dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi akibat tindakan manajer untuk melakukan penghindaran pajak tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan guna menutupi kinerjanya yang buruk atau untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit, anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang, anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen. Selain itu komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen perusahaan, memiliki pengalaman yang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna menjaga integritas serta pandangan objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit

(FCGI, 2002) dalam (Utami, 2013). Pada penelitian ini komite audit diukur dengan menghitung jumlah keberadaan komite audit dalam persahaan pada tahun tertentu.

C. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*

Rasio GPM (*gross profit margin*) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan berdasarkan tingkat penjualan. Menurut dosenakuntansi.com laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk. Tingginya rasio *profitabilitas* menunjukkan efisiensi oleh pihak manajemen. Peningkatan laba berdampak pada beban pajak yang harus dibayarkan lebih besar. Sehingga kemungkinan melakukan upaya *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian oleh Agusti (2014) bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun menurut Rosalia & Sapari (2017) dan Cahyono, dkk (2016) bahwa variable

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Jasmine (2017) memiliki hasil yang berbeda yakni *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1 : *Profitabilitas* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (Mayangsari, 2015). *Leverage* digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun, utang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan mengakibatkan beban Bunga tinggi sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena laba berkurang akibat bunga yang tinggi. Dalam hal ini merupakan cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan utang perusahaan. Berdasarkan penelitian yang terkait dengan *leverage*, Jasmine (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil uji analisis regresi yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) secara statistik *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

3. Pengaruh *dewan komisaris independen* terhadap *tax avoidance*

Dewan Komisaris Independen berperan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan anggota direksi perusahaan, serta bertugas untuk mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh manajer karena manajer kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka ingin memaksimalkan laba bersih dengan

melakukan tindakan penghematan pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) agar mendapatkan bonus. Dengan banyaknya jumlah *komisaris independen* maka akan semakin besar pengawasan yang dilakukan dengan begitu manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan. Diharapkan semakin besar proporsi *komisaris independen* dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan (Wulandari:2005). Hasil penelitian yang berkaitan dengan proporsi *dewan komisaris independen* dilakukan oleh Sari (2014) dan Rosalia & Sapari (2017) menyatakan bahwa proporsi *dewan komisaris independen* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil pengujian oleh Agusti (2014), proporsi *dewan komisaris independen* tidak berpengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance*.

H3: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

4. Pengaruh *komite audit* terhadap *tax avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Mahulae, 2016). Peran dari *komite audit* sebagai pengawas atau monitoring dalam membantu dewan komisaris serta memberikan masukan kepada pihak manajer dalam melakukan pengambilan keputusan guna mengelola internal secara efektif. Maka dalam penelitian ini dewan komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif sehingga sangat kecil terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016), menyatakan bahwa *komite audit* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menghasilkan *komite audit* yang dibentuk sebagai alat mekanisme pengawasan tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

H4: Komite Audit berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

